

### BAB III

## RESPON INDONESIA TERHADAP PELAKSANAAN PERDAGANGAN

### BEBAS: IJEPA DAN ACFTA

Sebagai negara berkembang yang mulai tumbuh dan sedang mencari jati diri, Indonesia menjadi lebih agresif dalam merespon liberalisasi ekonomi melalui perdagangan bebas dan bentuk kerjasama liberal lainnya. Dengan mencermati berbagai arus peristiwa dalam kurun waktu beberapa dekade terakhir, sangatlah sulit untuk membantah pandangan bahwa tatanan hubungan internasional telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Hubungan antar negara telah bergerak dinamis dan mengalami transisi dari suatu tatanan ke bentuk tatanan lain, sebagai suatu respon atas berkembangnya berbagai perubahan situasi dan kondisi internasional yang terjadi. Dalam hal ini, liberalisasi ekonomi melalui perdagangan bebas telah menawarkan peluang sekaligus ancaman serius bagi negara berkembang yang belum siap meliberalisasi seluruh sektor perekonomian dan perindustrian, dan hal itu yang sedang dialami oleh Indonesia dalam kerjasama dengan Jepang (IJEPA) dan China (ACFTA). Agar tidak terkesan menduga-duga fenomena yang sedang berlangsung secara kompetitif tersebut, bab ini akan membahas tentang :*Pertama*, Dinamika Perdagangan Bebas Dalam Dimensi Global, yang meliputi : Sejarah Perdagangan Bebas, Pro-Kontra Terhadap Perdagangan Bebas, dan Arah Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Sistem Perdagangan Bebas. *Kedua*, Keikutsertaan Indonesia dalam forum

dalam Kerjasama IJEPa, dan Menyoal Kepentingan Indonesia. *Ketiga*, Keikutsertaan Indonesia dalam forum ACFTA, yang meliputi : Latar Belakang dan Prinsip Dasar Kerjasama ACFTA, Sektor-sektor dalam Kerjasama ACFTA, dan Menyoal Kepentingan Indonesia. *Keempat*, Kedigdayaan Negara Maju Dalam Menekan Negara Berkembang Melalui Perdagangan Bebas, yang meliputi : Hubungan FTA dengan GATT-WTO dalam Perdagangan Global, Kepentingan Jepang dalam IJEPa, Kepentingan China dalam ACFTA.

#### **A. Dinamika Perdagangan Bebas Dalam Dimensi Global**

Perdagangan bebas muncul sebagai kekuatan ekonomi untuk mendorong pembangunan nasional bagi masing-masing negara di dunia. Cara tersebut mulai efektif dilakukan setelah berakhirnya Perang Dunia ke-II, terutama saat negosiasi *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pertama tahun 1948-1994 berhasil mengurangi tarif (kendala perdagangan internasional) sampai sekitar 20 persen. Selain itu, pembentukan organisasi perdagangan multilateral atau *World Trade Organization* (WTO) pada 1 Januari 1995, semakin meyakinkan negara-negara dunia betapa pentingnya perdagangan bebas, baik dalam kerangka bilateral, regional, maupun multilateral.

Perkembangan ekonomi dunia yang begitu pesat telah meningkatkan kadar

menambah semakin rumitnya strategi pembangunan.<sup>71</sup> Seiring dengan kecenderungan tersebut, perdagangan bebas telah berhasil membuktikan masing-masing argumentasi pendukung ataupun penentang dari implementasi kebijakan ekonomi tersebut. Dibeberapa negara maju, terutama di Eropa dan Amerika Serikat perdagangan bebas sukses dalam hal meningkatkan volume perdagangan dan perekonomian secara berkesinambungan, namun di beberapa negara berkembang, terutama di Asia dan Indonesia yang terjadi justru sebaliknya perdagangan bebas semakin memperlebar jurang sosial masyarakat (si kaya dan si miskin) sehingga perlu perhatian lebih lanjut. Pendukung dan penentang perdagangan bebas, didasari oleh tiga perspektif utama yaitu :*Pertama*, Perspektif Liberalisme Ekonomi. *Kedua* Realis-Merkantilis. *Ketiga*, Neo-Marxisme.

Globalisasi ekonomi melalui perdagangan bebas telah menciptakan integrasi ekonomi internasional dengan tingkat ketergantungan ekonomi antar negara yang semakin tinggi dan kecenderungan semakin mudahnya mobilitas barang, jasa, tenaga kerja, investasi dan modal. Dalam merespon dinamika yang berkembang tersebut, kebijakan politik luar negeri Indonesia diarahkan kepada pusran kerjasama dan perdagangan bebas dunia, baik dalam skope bilateral, regional, ataupun multilateral. Hal tersebut didasari oleh politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, selain sebagai tuntutan dari perubahan konstelasi ekonomi politik global yang menawarkan resep jitu dalam

---

<sup>71</sup> Halwani, Hendra & Tjiptoherijanto, H Priyono, *Perdagangan Internasional : Pendekatan*

mempercepat pembangunan nasional, yakni melalui pergaulan/kerjasama internasional (ekonomi) dan perdagangan bebas.

## 1. Sejarah Perdagangan Bebas

Sejarah dari perdagangan bebas atau *Free Trade*<sup>72</sup> adalah sejarah perdagangan internasional yang memfokuskan pada pengembangan dari pasar terbuka. Teori ini berkembang dari rasa modernnya kebudayaan komersil di Inggris, dan lebih luas lagi Eropa, sepanjang lima abad yang lalu. Sebelum kemunculan perdagangan bebas, dan keberlanjutan hal tersebut hari ini, kebijakan dari merkantilisme<sup>73</sup> telah berkembang lama di Eropa di tahun 1500.<sup>74</sup>

Perdagangan bebas berkembang di banyak negara pada abad 19 dan awal abad 20 M, tetapi setelah Perang Dunia II kebanyakan negara menerapkan kebijaksanaan proteksi (neo-merkantilisme). Arah utama hubungan ekonomi internasional sejak Perang Dunia II mencakup upaya

---

<sup>72</sup>*Free Trade* menekankan arus perdagangan yang didasarkan pada penawaran dan permintaan, bebas dari upaya memajukan, pengawasan, serta aturan pemerintah. Perdagangan bebas dikemukakan oleh Adam Smith (*Wealth of Nations*: 1776) untuk mengembangkan pembagian kerja internasional berdasarkan spesialisasi setiap bangsa dalam memproduksi sehingga tercapai tingkat produktifitas dan standar kehidupan yang setara bagi semua negara di dunia atau akan terjadi keuntungan mutlak. Selain itu, keuntungan mutlak dapat diperoleh, jika aktivitas perdagangan atau perekonomian bebas diserahkan kepada mekanisme pasar daripada campur tangan negara yang berlebihan. Untuk selanjutnya dari waktu kewaktu kapitalisme Adam Smith dan Merkantilisme David Ricardo selalu bersinggungan. Lihat Jack C. Plano & Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, Edisi ketiga, terj: Wawan Juanda, (Putra A Bardin),. Hlm. 112.

<sup>73</sup>Merkantilisme (asal mula pemikiran perdagangan internasional/bebas konvensional) mendukung ide bahwa negara memiliki peran yang lebih besar dibandingkan pasar dalam mengatur interaksi ekonomi. Dengan kata lain merkantilisme menganggap ekonomi adalah alat politik, suatu dasar bagi kekuasaan politik. Selain itu, merkantilisme melihat perekonomian internasional sebagai arena konflik antara kepentingan nasional yang bertentangan, daripada sebagai wilayah kerjasama dan saling menguntungkan. Lihat Robert Jackson & George Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009,. Hlm. 231.

<sup>74</sup>*Op Cit. Penelitian Perdagangan*, Hlm. 72-73

bersama untuk menghapuskan kendala perdagangan yang berkembang pada masa nasionalisme ekonomi tahun 1920-an dan tahun 1930-an.<sup>75</sup>

Sejak 1930 sistem perdagangan dunia cenderung proteksionisme, sehingga hal ini melatarbelakangi pembentukan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada tahun 1947 yang digagas oleh beberapa negara industri. Mulai tahun 1948-1994 GATT merumuskan dan menerapkan peraturan-peraturan mengenai perdagangan dunia guna menghasilkan pertumbuhan perdagangan dunia yang lebih optimal. Mengingat GATT bukanlah sebuah organisasi melainkan suatu perjanjian, sehingga dibentuklah wadah organisasi multilateral terstruktur yaitu *World Trade Organization* (WTO) pada 1 Januari 1995.

Pembentukan WTO melalui pertemuan *Uruguay Round* bertujuan untuk, memantau pelaksanaan perjanjian-perjanjian perdagangan dan mengatasi pertentangan diantara partner dagang. Selain itu, dalam forum ekonomi WTO hampir semua jenis dan komoditi perdagangan diatur, mulai dari klip kertas sampai dengan pesawat jet. Intinya WTO meliputi semua produk, sektor, dan kondisi-kondisi yang belum terdapat dalam GATT.<sup>76</sup>

Salah satu kebijakan proteksionis di era 1920-1930an adalah *beggar-thy-neighbor policies*. Kebijakan ini ditetapkan pada 1930, kemudian terbentuklah *International Monetary Fund* (IMF) sebuah lembaga untuk

---

<sup>75</sup>*Op Cit., Kamus Hubungan.,* Hlm. 112.

<sup>76</sup>*Ibid.* Hlm. 78. (Diolah).

memperkenalkan stabilitas dan kesejahteraan melalui penetapan sistem moneter yang stabil. Sistem ini kemudian menjadi dasar bagi perdagangan multilateral.<sup>77</sup>

Perdagangan bebas dalam dimensi ekonomi global diatur melalui tiga regim ekonomi, yaitu : *Bretton Woods*, *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan *World Trade Organisation* (WTO). *Bretton Woods*, disepakati di New Hampshire pada Juli 1994, yang mendasarkan pada premis *commercial liberalism* yang mengusulkan pasar bebas dengan sedikit pembatasan pada perdagangan swasta dan perputaran modal.<sup>78</sup> Untuk lebih jelas dalam memahami setiap fase sejarah dan perkembangan perdagangan bebas (dunia), dapat dilihat secara ringkas dalam tabel 6.<sup>79</sup>

**Tabel. 6. Sejarah Sistem Perdagangan Dunia 1500-1995**

<b>Periode</b>	<b>Keterangan</b>
<i>Pertama</i> , 1500-1750 (Merkantilisme)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulasi yang ketat oleh Pemerintah</li> <li>• Monopoli dalam semua usaha</li> <li>• Pembatasan ketat dalam perdagangan</li> <li>• Hubungan ekonomi yang tegang dengan negara lain</li> <li>• Tujuan ekonomi dipusatkan pada akumulasi emas sebagai tujuan nasional</li> </ul>
<i>Kedua</i> , 1815-1914 Liberalisme Perdagangan (Zaman keemasan sistem perdagangan dunia)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdagangan bebas</li> <li>• Kebebasan lalu lintas alat pembayaran</li> <li>• Kebebasan lalu lintas modal</li> <li>• Kebebasan lalu lintas imigrasi</li> <li>• Pengembangan sendi-sendi yang</li> </ul>

<sup>77</sup>Op Cit, Laporan Studi, Hlm. 76-77.

<sup>78</sup>Elisabeth, Adriana, Marhad, Dhurorudin, Wuryandari, Ganewati (editor), dkk. *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Maret 2011), Hlm. 75-78.

<sup>79</sup>Kartadjoemena, *GATT dan WTO : Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang*

	menunjang perdagangan bebas di bidang finansial, perbankan, asuransi, pelayaran, dan bursa komoditi
<i>Ketiga</i> , 1918-1941 Fragmentasi sistem perdagangan dunia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontraksi kegiatan ekonomi (depresi-1930-an)</li> <li>• Peningkatan proteksionisme</li> <li>• Restriksi dalam lalu lintas devisa</li> <li>• Restriksi dalam lalu lintas modal</li> <li>• Peningkatan hambatan terhadap imigrasi</li> <li>• Saling relasi dalam mengatasi krisis ekonomi (beggar-thy-neighbor policy)</li> </ul>
<i>Keempat</i> , 1945-1994 Periode pasca Perang Dunia II	<p>A. Perkembangan positif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya mengurangi proteksionisme melalui sistem dan aturan multilateral (GAAT)</li> <li>• Upaya mengadakan sistem moneter dan pembayaran internasional yang lebih teratur dan bebas (IMF)</li> <li>• Upaya untuk mengerahkan dana untuk rekonstruksi dan pembangunan (Bank Dunia)</li> <li>• Upaya untuk membantu pembangunan negara berkembang melalui bantuan luar negeri dan bantuan teknis</li> </ul> <p>B. Perkembangan negatif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Timbulnya persaingan yang tegang antara dunia Marxis dan non-Marxis serta antara Blok Barat dan Blok Marxis</li> <li>• Perbedaan kepentingan negara maju dan negara berkembang</li> </ul>
<i>Kelima</i> , 1989-Pasca Perang Dingin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Runtuhnya rezim Marxis di seluruh dunia</li> <li>• Meningkatnya persaingan dagang dan ekonomi antara negara maju dan non-Marxis</li> <li>• Meningkatnya blok regional (yang bisa saling bertentangan atau saling bekerjasama)</li> <li>• Meningkatnya peranan negara berkembang</li> <li>• Timbulnya negara industri baru (NICS)</li> </ul>

Dalam perkembangan ekonomi internasional, pertentangan nilai-nilai tentang merkantilisme dan liberalisme terus terjadi. Merkantilisme menganjurkan peraturan pemerintah di bidang ekonomi ditunjukkan untuk meningkatkan kekuasaan dan keamanan negara. Sedangkan liberalisme menentang keterkaitan pemerintah secara penuh dalam proses perdagangan, karena hanya akan membuat perdagangan/pasar menjadi tidak efisien.

## **2. Pro-Kontra Perdagangan Bebas Dan Permasalahannya**

Saat ini dunia sedang berada dalam globalisasi ekonomi yang menciptakan integrasi internasional dengan ketergantungan ekonomi antarnegara yang semakin tinggi dan kecenderungan semakin mudahnya mobilitas barang, jasa, tenaga kerja, investasi dan modal. Globalisasi ekonomi, sebenarnya bukanlah fenomena baru dalam sejarah peradaban dunia. Jauh sebelum kemunculan *nation state*, pandangan dan migrasi lintas benua sudah berlangsung sejak lama. Kurang lebih sejak lima abad yang lalu, perusahaan-perusahaan di negara-negara yang menerapkan sistem perekonomian liberal telah meluaskan jangkauannya melalui aktivitas produksi dan perdagangan ke berbagai belahan dunia (Khor, 2002).<sup>80</sup>

Sesungguhnya kepopuleran istilah “globalisasi ekonomi” dan “pasar bebas” pada hakekatnya adalah bentuk baru dari perkembangan

---



kapitalisme. Di masa lalu, untuk menjamin tersedianya bahan baku dan pasar bagi barang-barang yang diproduksi oleh sebuah negara, kapitalisme berubah bentuk menjadi imperialisme dan kolonialisme. Caranya adalah dengan menaklukan negeri-negeri lain secara fisik dan menjadikan negeri-negeri tersebut sebagai jajahan atau koloninya. Negara-negara yang lebih kuat bisa secara paksa membeli bahan baku dengan harga yang sangat murah, selanjutnya menjual hasil produknya dengan harga yang sangat tinggi. Namun pada realitasnya, cara-cara tersebut telah dianggap kuno, tidak beradab, dan bertentangan dengan hak asasi manusia yang diakui sebagai hak universal (Yudotomo, 2000:8). Oleh karena itu, agar negara-negara yang lebih kuat masih mampu membeli bahan baku dengan harga semurah mungkin, maka negara-negara maju merumuskan suatu cara yang lebih canggih, yakni melalui globalisasi dan pasar/perdagangan bebas.<sup>81</sup>

Secara teoritis terdapat tiga pendekatan atau pandangan yang mempengaruhi pro-kontra atau paling tidak menambah pemahaman kritis terhadap globalisasi ekonomi melalui perdagangan bebas, seperti; Liberalisme Ekonomi, Realis-Merkantilis, dan Neo-Marxisme. Mudah bagi masing-masing pendukung perspektif tersebut menemukan kata sepakat bahwa globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas sedang berlangsung. Tetapi mereka tidak sepakat mengenai muatan nyata proses

<sup>81</sup> Menurut Yudotomo (2000:8) "Globalisasi ekonomi global" mereka

juga tidak sepakat mengenai akibat dari globalisasi ekonomi yang membentuk perdagangan bebas bagi negara.<sup>82</sup>

Sejalan dengan pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas baik dalam skope bilateral, regional, dan multilateral, oleh majalah *The Economist* pernah diselenggarakan *polling* untuk mengukur perbandingan kekuatan antara pendukung perdagangan bebas dengan pendukung *protectionism*. Polling dalam lingkup internasional ini telah melibatkan dua puluh dua ribu (22. 000) orang di dua puluh dua (22) negara dengan pertanyaan: Apa cara terbaik untuk meningkatkan kondisi perekonomian dan lapangan kerja dimasing-masing negara, melalui suatu bentuk proteksi/perlindungan terhadap industri domestik dengan cara restriksi perdagangan ?

Setelah dilakukan *polling* ternyata hasil polling di luar dugaan : para pendukung proteksi terhadap industri domestik unggul terhadap pendukung perdagangan bebas dengan empat puluh tujuh persen (47 %) lawan empat puluh dua persen (42%). Bahkan di Amerika Serikat, negara adidaya yang paling keras memperjuangkan *Free Trade* mendapat hasil yang sangat mengejutkan dan di luar dugaan, pendukung *protectionism* unggul terhadap pendukung perdagangan bebas dengan lima puluh enam persen (56%) lawan tiga puluh tujuh persen (37%). Hasil polling yang diselenggarakan oleh NBC News/Wall Street Journal yang hasilnya lima

perdagangan bebas berakibat buruk terhadap perekonomian negaranya, dan hanya tiga puluh dua persen (32%) yang berpendapat sebaliknya.<sup>83</sup>

Selain gambaran umum pro-kontra melalui data statistik di atas, ada juga gambaran khusus pro-kontra pelaksanaan perdagangan bebas tersebut. Argumentasi yang mendukung perdagangan bebas sebagai suatu keniscayaan, adalah :*Pertama*, perdagangan bebas yang didengungkan bisa menghindarkan kerugian efisiensi yang diakibatkan oleh adanya proteksi (kebebasan memilih partner dagang), meski harus melalui mekanisme perjanjian internasional. *Kedua*, dengan adanya perdagangan bebas memungkinkan munculnya keuntungan tambahan yang tidak dapat diperoleh apabila terjadi distorsi konsumsi dan produksi. *Ketiga*, dengan adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan dalam negeri untuk melakukan ekspansi usaha ke luar negeri atau juga untuk bersaing dengan produk impor akan membuat pelaku industri semakin kreatif dan inovatif.<sup>84</sup>

Sedangkan bagi mereka yang menganggap perdagangan bebas sebagai pemicu disparitas antara negara maju dengan negara berkembang berargumen: *Pertama*, tidak semua negara memiliki kompetensi serta kemampuan yang sama untuk melakukan persaingan di pasar global yang lebih terbuka sehingga ada saja negara yang dirugikan. *Kedua*, adanya pencabutan tarif menyebabkan membanjirnya barang legal kiriman dari

---

<sup>83</sup> *Op Cit*, *Perjanjian Perdagangan*,. Hlm. 74.

<sup>84</sup> <http://www.bimbie.com/perdagangan-bebas.htm>. Terakhir diakses pada 7 April 2013 pukul 03.51 WIB.

luar negeri. *Ketiga*, dengan adanya perdagangan bebas yang tidak terkendali, bisa jadi menjadi sarana transmisi penyakit yang berbahaya bagi kesehatan manusia di negeri tujuan dimana barang tersebut diperdagangkan. Seperti ekspor terigu dari Srilangka ke Indonesia tahun lalu, yang mengandung *Potassium Bromate*, padahal *potassium bromate* di banyak negara seperti di China, Nigeria, Brazil, Peru, Kanada, Eropa termasuk Inggris, sudah dilarang karena menyebabkan kanker.<sup>85</sup>

### **3. Arah Kebijakan PLN RI Dalam Sistem Perdagangan Bebas**

Doktrin politik luar negeri Indonesia yang Bebas Aktif adalah buah pemikiran proklamator Bung Hatta yang dicetuskan pertama kali pada rapat KNIP di Yogyakarta tanggal 2 September 1948. Bebas Aktif merupakan tanggapan maupun strategi Indonesia terhadap konstelasi internasional saat itu, ketika dunia terpolarisasi menjadi blok Barat dan Timur. Politik Bebas Aktif mengandung dua unsur, Bebas diartikan tidak terlibat dalam suatu aliansi militer atau pakta pertahanan dengan kekuatan luar yang menjadi ciri khas Perang Dingin. Dalam arti yang lebih luas, Bebas menunjukkan nasionalisme yang tinggi, menolak keterlibatan maupun ketergantungan kepada pihak luar yang dapat mengurangi kedaulatan. Aktif diartikan bahwa Indonesia selalu menentang penjajahan dan memajukan perdamaian dunia.

---

<sup>85</sup> <http://ekbis.rmol.co/read/2012/11/15/85372/Bahan-Makanan-Membahayakan-Kesehatan-Kok->

Dewasa ini pada dasarnya politik luar negeri RI tidak mengalami perubahan, yaitu tetap politik luar negeri bebas aktif yang berdasarkan pada UUD 1945. Arah politik Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat. Di samping itu, dengan telah disahkannya Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan politik luar negeri RI selalu merujuk pada ketentuanketentuan termaksud dalam UU tersebut.

Perubahan dalam globalisasi ekonomi berdampak pada pola interaksi antarnegara dan kelompok masyarakat. Dalam rangka menentukan arah atau orientasi kebijakan politik luar negeri, Indonesia perlu memperhatikan perubahan dan kecenderungan perkembangan ekonomi global.<sup>86</sup>

Di tingkat global dan secara multilateral, politik luar negeri Indonesia dilakukan dengan membangun kesepakatan ataupun kerjasama perdagangan di tingkat global melalui keanggotaan Indonesia dalam WTO, di tingkat regional seperti menjadi anggota APEC dan ASEAN, maupun secara bilateral, khususnya kerjasama perdagangan dengan Jepang, AS, China dan lain-lain. Selain terlibat dalam kerjasama ekonomi regional dan

sub-regional ASEAN, Indonesia juga berkiprah dalam forum kerjasama ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang dibentuk tahun 1989 yang anggota-anggotanya adalah mitra dagang utama Indonesia.<sup>87</sup>

Arah kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam berbagai forum kerjasama ekonomi baik dalam forum kerjasama multilateral, regional, maupun bilateral terlebih dalam merespon perkembangan dan perubahan ekonomi global, mengacu pada pencapaian kepentingan nasional, yakni kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Secara umum tujuan tersebut coba direalisasikan dengan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, terutama melalui forum kerjasama ekonomi *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* dan *ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)*.

Dalam rangka merespon perkembangan dan perubahan konstelasi perekonomian global serta meningkatkan daya saing demi pencapaian kepentingan nasional melalui berbagai forum kerjasama yang diikuti, Pemerintah Indonesia melalui Departemen Perdagangan RI telah menetapkan empat misi utama. Keempat tujuan tersebut adalah: *Pertama*, meningkatkan kelancaran distribusi, penggunaan produk dalam negeri, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. *Kedua*, mengoptimalkan keuntungan daya saing Indonesia dalam persaingan global. *Ketiga*, mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola

pengembangan, dan proses konsultasi publik dalam pengambilan keputusan di sektor perdagangan. Penetapan standarisasi nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2000 Pasal 3, turut mendukung arah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, terlebih sebagai respon terhadap perubahan-perubahan ekonomi global.

Selain itu, untuk mencapai prioritas pembangunan nasional dan meningkatkan perdagangan Indonesia, pada tahun 2008 Menteri Perdagangan RI menetapkan sejumlah program prioritas atau sektor-sektor unggulan untuk dikembangkan, yang meliputi sepuluh produk utama, sepuluh produk potensial dan tiga jasa (10+10+3). Kesepuluh produk utama terdiri dari udang, kopi, minyak kelapa sawit (CPO), kakao, karet, tekstil dan produk tekstil (TPPT), alas kaki, elektronika, komponen otomotif dan furnitur. Sedangkan kesepuluh produk potensial adalah kerajinan tangan, ikan dan produk ikan, tumbuhan obat, kulit dan produk kulit, makanan olahan, perhiasan, minyak atsiri, rempah-rempah, peralatan kantor bukan kertas, dan alat kesehatan. Adapun tiga jasa bidang

## B. Kerjasama Indonesia-Jepang Dalam Forum IJEPA

Agresifitas Indonesia dalam berbagai forum kerjasama ekonomi internasional dilakukan sebagai upaya untuk keluar dari bayang-bayang krisis tahun 1997/98, terlebih untuk mensejajarkan diri dengan negara-negara maju di Dunia. Demi mencapai tujuan tersebut, sekurang-kurangnya Indonesia telah terlibat dalam perjanjian *Economic Partnership Agreement* (EPA atau kerjasama ekonomi dan perdagangan bebas atau (EPA) dan *Free Trade Agreement* (FTA) dengan negara maju, seperti Jepang dan China melalui forum kerjasama *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) dan *ASEAN-China Free Trade Area*. (ACFTA).

IJEPA merupakan perjanjian kerjasama Ekonomi bilateral antara Indonesia dengan Jepang yang ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Shinjo Abe. Kesepakatan ini merupakan perjanjian perdagangan bebas bilateral pertama yang dilakukan Indonesia, dan yang paling komprehensif.

Berbeda dengan kerjasama ekonomi sebelumnya, EPA merupakan bentuk lain dari *Free Trade Agreement* (FTA) atau biasa disebut dengan FTA *plus-plus*, dengan cakupan isu lebih dari sekedar percepatan perdagangan bebas lewat penurunan tarif BM. Bentuk kerjasama EPA dilakukan untuk mendorong dan menjamin kegiatan investasi, kebebasan lalu lintas uang, barang dan tenaga kerja, jaminan penyediaan barang bagi pemerintah, bahkan kerjasama dalam menentukan arah kebijakan ekonomi. Berbagai isu/elemen

Jenis kerjasama EPA seperti tersebut di atas didasarkan pada tiga nilai



perundingan, yaitu: **Liberalisasi akses pasar, Fasilitasi perdagangan dan investasi, dan Kerjasama melalui *capacity building* untuk sektor-sektor industri prioritas.** Pencapaian kepentingan nasional Indonesia tentu salah satunya melalui pemanfaatan peluang dalam kerjasama IJEPA, dimana ekonomi dan politik dijadikan sandaran pencapaian kepentingan nasional tersebut. Untuk selanjutnya pada sub bab ini akan membahas tentang latarbelakang dan prinsip dasar kerjasama, sektor-sektor dalam kerjasama IJEPA, dan menyoal kepentingan Indonesia.

### **1. Latar Belakang dan Prinsip Dasar Kerjasama IJEPA**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang (NB) yang sangat aktif dalam melakukan kerjasama ekonomi baik dalam kerangka bilateral, regional, maupun multilateral. Agresifitas kerjasama ekonomi dalam dimensi global tidak hanya dilakukan oleh negara berkembang seperti Indonesia saja, melainkan oleh negara maju dan kaya seperti Jepang, tentu dengan motif yang berbeda. Bagi Indonesia keaktifan dalam berbagai forum kerjasama ekonomi diharapkan dapat memperbesar kapasitas perdagangan dan perekonomian, namun bagi Jepang yang lebih agresif dalam forum kerjasama ekonomi bilateral dan regional daripada aktif dalam forum multilateral, mengharapkan keuntungan yang lebih istimewa dari setiap partnernya, seperti Indonesia yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) tidak lepas dari perhatian Jepang untuk mendapatkan daya saing ekonominya di pasar global.

Selain itu, Jepang merupakan partner dagang yang utama, dimana Jepang saat ini menempati *ranking* pertama dari sasaran pasar ekspor Indonesia, dan sebagai negara dengan investasi yang cukup tinggi di Indonesia sehingga sayang untuk dilewatkan. Sedangkan, bagi Jepang, Indonesia adalah pasar yang sangat penting. Meskipun telah mengalami penurunan dibanding dekade lalu, bagi Jepang Indonesia masih termasuk importir terbesar ke-6 (4,3%), setelah China, AS, Arab Saudi, Australia dan UEA. Sementara dari sisi impor, Indonesia juga merupakan negara mitra penting karena Indonesia merupakan pemasok utama industri manufaktur Jepang baik untuk komoditas energi, bahan baku dan bahan mentah. Saat ini ketergantungan Jepang untuk beberapa komoditas impor dari Indonesia masih sangat besar khususnya untuk komoditas tambang, seperti ditunjukkan pada tabel 7 berikut.<sup>89</sup>

**Tabel 7. Tingkat ketergantungan Jepang terhadap Produk Indonesia  
(import dependency ratio)**

No.	Komoditas	Presentase (%)
1.	Mate Nikel	89
2.	Kertas dan kertas karton yang tidak dilapisi, dari jenis yang digunakan untuk penulisan, percetakan	80
3.	<i>Technically Specified Natural Rubber</i> (TSNR-karet alam dengan spesifikasi teknis)	77
4.	Biji dan konsentrat Nikel	49
5.	Kayu lapis terdiri hanya dari lembaran kayu, dengan ketebalan paling tidak 6 mm	38
6.	Timah bukan paduan tidak ditempa ( <i>Tin not Alloyed unwrought</i> )	37
7.	Abu dan residu, mengandung logam dan senyawanya ( <i>Ash and residues containing</i>	35

	<i>metals or metal compounds, excl. those fr)</i>	
8.	Minyak petroleum ringan sulingan ( <i>Light petroleum distillates nes</i> )	30
9.	Batubara dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak di aglomerasi ( <i>Coal nes, whether or not pilverised but not agglomerated</i> )	29
10.	Udang kecil dan udang biasa, beku, berkulit atau tidak, termasuk direbus dalam kulit	20
11.	Gas alam, cair	19
12.	Ban bertekanan baru dari karet untuk mobil termasuk station wagon dan mobil balap	18
13.	Biji dan konserat tembaga	15
14.	Roda termasuk bagian-bagiannya dan aksesoris untuk kendaraan	14
15.	Batubara bitumen dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi	12

Sumber: ITC, (diolah)

Umumnya, alasan pemerintah untuk lebih agresif dalam berbagai *Free Trade Agreement* (FTA) karena strategi FTA dianggap akan menjadi terobosan bagi perundingan di forum multilateral yang lamban, mengingat dalam forum multilateral prinsip-prinsip dan perbedaan tingkat kemajuan pembangunan antar negara anggota menjadi faktor penting, sehingga masih sangat dipertimbangkan dan diberi peluang untuk diperjuangkan dan dinegosiasikan oleh masing-masing anggota, sebelum penyusunan kesepakatan. Sedangkan dalam FTA, terutama FTA bilateral, pertimbangan perbedaan-perbedaan tersebut seolah semakin tipis dan menjadi hambatan yang lebih cepat diselesaikan.<sup>90</sup> Eliminasi hambatan perdagangan (tarif BM) antara Indonesia dan Jepang dapat mempengaruhi harga barang-barang dan jasa yang diperdagangkan sehingga pada gilirannya akan

berpengaruh pada volume perdagangan dan kesejahteraan ekonomi kedua negara.

Kerjasama kemitraan ekonomi dan perdagangan bebas Indonesia dengan Jepang dalam kerangka EPA, telah melewati serangkaian diplomasi dan negosiasi yang cukup lama, meski pada akhirnya disepakati pada tanggal 20 Agustus 2007, dan baru berlaku efektif pada 1 Juli 2008. Adapun rangkaian diplomasi dan negosiasi yang dimaksud adalah sebagai berikut.

**Pada bulan Juli 2003**, Jepang dan Indonesia sepakat menggali lebih dalam kemungkinan kerjasama bilateral di bidang ekonomi. Kedua pihak kemudian membentuk *Joint Study Group* (JSG) yang membahas bentuk dan kerjasama bilateral tersebut. **Pada awal tahun 2005**, *Joint Study Group* ini mengadakan tiga kali rapat untuk memutuskan layak tidaknya dilaksanakan FTA plus-plus antara kedua negara serta memutuskan kapan dimulainya proses negosiasi. Pada tanggal 2 Juni 2005, dalam kunjungannya ke Tokyo, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi menandatangani kesepakatan dimulainya negosiasi FTA dengan kerangka *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA). Ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan kerjasama dengan Jepang bagi Indonesia.<sup>91</sup>

Berbagai perundingan dan *intersesion meeting* kemudian dilaksanakan antara bulan Juli 2005 sampai dengan Juni 2007. Proses perundingan yang panjang dan melelahkan ini pada akhirnya mencapai puncaknya pada saat IJEPA ditandatangani pada 20 Agustus 2007 oleh kedua kepala pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Jakarta, Indonesia. Dalam rangka implementasi IJEPA masing-masing pihak telah selesai mempersiapkan berbagai kebijakan dan infrastruktur pendukungnya, yang pada akhirnya implementasi dari IJEPA tersebut juga telah disepakati untuk dimulai (*entry to force*) pada tanggal 1 Juli 2008.<sup>92</sup>

Sebagaimana FTA lainnya, IJEPA merupakan bentuk kerjasama yang mencakup isu tradisional FTA yakni liberalisasi barang dan jasa maupun isi tambahan penting yang tidak dibahas dalam WTO atau disebut WTO *plus*. Isu liberalisasi barang dan jasa akan diimplementasikan dalam bentuk penghapusan hambatan tarif dan non-tarif. Dalam perjanjian IJEPA, hampir semua post tarif ditargetkan untuk segera dihapuskan. Jepang telah memasukan lebih dari 90 persen pos tarif yang akan setara 90 persen dari nilai ekspor Indonesia ke Jepang. Hampir sama dengan Jepang, Indonesia juga menyepakati lebih dari 93 persen pos tarif yang akan setara dengan 92 persen dari nilai ekspor Jepang ke Indonesia. Untuk perundingan, Jepang melakukan *exclusion list* (daftar pengecualian) bagi

<sup>92</sup> <http://www.kemenperin.go.id/download/3277/Laporan-Studi-2008--Kajian-Capacity-Building-Industri-Manufaktur-yang-Mempunyai-Daya-Saing-di-Pasar-Global>. PDF, Hlm. 34-35. Terakhir diakses 5 Juli 2013 pukul 10.08 WIB.

886 pos tarif, demikian juga Indonesia yang memberlakukan bagi 834 pos tarif.<sup>93</sup>

Indonesia membuka akses pasarnya sekitar 93 persen dari 11.163 *tariff line*-nya bagi produk Jepang, dengan 58 persen dari *tariff line* tersebut akan langsung berlaku sejak perjanjian dimulai pada 1 Juli 2008. Sebaliknya Jepang membuka pasarnya bagi produk Indonesia lebih dari 90 persen dari 9.275 *tariff line*-nya, dengan 80 persen dari *tariff line* tersebut langsung berlaku sejak perjanjian dimulai.<sup>94</sup>

## 2. Sektor-sektor Dalam Kerjasama IJEPA

Sebagaimana tersebut di atas bahwa perjanjian bilateral dalam kerangka *Economic Partnership Agreement* (EPA) yang diberlakukan Jepang dengan mitra strategisnya terutama Indonesia, mencakup isu kerjasama yang lebih luas, yakni tidak sekedar mencakup isu penghapusan hambatan tarif dan non tarif, tetapi mencakup juga liberalisasi akses pasar (barang dan jasa), fasilitasi perdagangan dan investasi, dan kerjasama melalui *capacity buiding* untuk sektor-sektor industri prioritas, yang menjadi tiga pilar utama dalam kerjasama IJEPA.

*Pilar pertama* adalah, Liberalisasi akses pasar. Dalam liberalisasi akses pasar, Indonesia dan Jepang sepakat untuk mengurangi hambatan perdagangan dan investasi (baik masuk dan keluar hukum)

*Pilar kedua*, fasilitasi perdagangan dan investasi. Pilar kedua ini berisi dua poin penting, yaitu kerjasama dibidang bea cukai, pelabuhan dan jasa-jasa perdagangan, dan yang kedua adalah upaya bersama untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan tingkat kepercayaan bagi para investor Jepang.

*Pilar ketiga*, adalah kerjasama melalui *capacity buiding* untuk sektor-sektor industri prioritas. Kesepakatan kerjasama dilakukan agar Jepang meningkatkan kapasitas industri Indonesia untuk dapat bersaing dan memanfaatkan secara optimal peluang dari kerjasama EPA ini. Untuk memperjelasnya, tawaran/permintaan dari kedua negara dapat dilihat dalam tabel 8 di bawah ini :

**Tabel 8. Perundingan EPA Indonesia-Jepang**

<b>Permintaan Indonesia</b>	<b>Permintaan Jepang</b>
1. Penghapusan tarif untuk : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barang-barang organik kimia</li> <li>• Tas plastik</li> <li>• Produk-produk gelas</li> <li>• Tekstil</li> <li>• Alas kaki</li> </ul>	1. Penghapusan tarif untuk : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otomotif dan bagian otomotif</li> <li>• Baja</li> <li>• Tekstil</li> <li>• Elektronik</li> </ul>
2. Bantuan teknis dalam isu lingkungan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	2. Penghapusan subsidi ekspor, berbagai hambatan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
3. Kerjasama antara pabean kedua Negara	3. Struktur pabean yang lebih terprediksi
4. Permintaan tenaga kerja terampil dan profesional dalam sektor pariwisata, kesehatan dan para pekerja kapal laut	4. Liberalisasi sektor manufaktur, informasi dan komunikasi, transportasi, pariwisata, keuangan, dan hukum

Selain ketiga pilar kerjasama dalam kesepakatan IJEPA tersebut di atas, telah disepakati juga sebelas (11) elemen dalam perundingan, yaitu :

- 1) *Trade in Goods*
- 2) *Rule of Origin*
- 3) *Custom Procedures*
- 4) *Investment*
- 5) *Trade in Service*
- 6) *Move of Natural Persons*
- 7) *Energy and Mineral Resources*
- 8) *Intellectual Property Right*
- 9) *Government Procurement*
- 10) *Competition Policy*
- 11) *Cooperation.*

Berikut uraian singkat mengenai masing-masing elemen dalam implementasi kebijakan luar negeri Indonesia-Jepang dalam kerjasama IJEPA.

**1) *Trade in goods* (perdagangan)**

Menyadari keinginan untuk meningkatkan kebebasan perdagangan antara kedua negara, kedua belah pihak akan menghilangkan atau mengurangi tarif secara komprehensif.



kehutanan, dan sektor perikanan dan sektor industri, yang akan memberikan kontribusi pada perluasan perdagangan dan lainnya yang terkait dengan perdagangan kegiatan antara kedua negara. Kedua belah pihak juga akan bekerja sama pada pengembangan kapasitas yang komprehensif berfokus pada meningkatkan daya saing Indonesia di sektor tersebut di atas.

**2) *Rules of Origin* (peraturan dasar)**

Kedua belah pihak mempunyai pandangan bahwa peraturan baik di bawah *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement* maupun di bawah EPA bilateral disatukan satu sama lain.

**3) *Custom Procedure* (prosedur tentang ekspor impor dan bea Cukai)**

Kedua belah pihak akan mempromosikan pertukaran informasi dan kerjasama untuk tujuan memfasilitasi perdagangan melalui penyederhanaan dan harmonisasi prosedur kepabeanan, dan memastikan penegakan hukum yang efektif. Pihak Jepang menunjukkan keseimbangan antara fasilitas perdagangan dan menjamin keamanan adalah penting dalam bidang ekspor-impor dan bea cukai. Industri Jepang meminta untuk meningkatkan kemungkinan dari ekspor-impor dan bea cukai lewat perbaikan lebih

ekspor-impor dan bea cukai, menyeragamkan dari penggunaan peraturan-peraturan, dan lain-lain.

#### **4) *Investment* (investasi)**

IJEPA akan menyediakan kerangka kerja untuk pengembangan lebih lanjut dan fasilitasi investasi lintas-perbatasan antara kedua negara melalui komitmen pada perlakuan nasional, pengobatan yang paling-*favoured-nation*, larangan persyaratan kinerja, penyelesaian sengketa antara negara dan investor, dan meningkatkan perlindungan investor dan investasi. Indonesia sendiri merupakan salah satu tujuan utama investasi Jepang bagi berbagai perusahaan multi nasionalnya. Saat ini diperkirakan terdapat sekitar 1000 perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia yang dapat menyerap tenaga kerja lokal berjumlah sekitar 280 ribu orang. Umumnya investasi Jepang tersebut bergerak pada sektor elektrik dan elektronik; otomotif dan peralatan pengangkutan; industri mineral & non-metal; kimia dan farmasi; serta perdagangan & bengkel.

#### **5) *Trade in Service* (perdagangan jasa)**

IJEPA akan menyediakan mekanisme untuk perbaikan lingkungan perusahaan dan promosi keyakinan perusahaan, dengan partisipasi kedua Pemerintah, sektor pribadi masing-masing dan organisasi lainnya. Pihak Jepang memberikan perhatiannya di bidang

liberalisasi jasa yang berhubungan dengan pembuatan jasa, informasi dan pelayanan keuangan, dan pelayanan hukum.

**6) *Movement of natural Person* (pergerakan alami manusia)**

Kedua belah pihak akan menyediakan kerangka kerja untuk memfasilitasi pergerakan orang alami dalam berbagai kategori, termasuk pengunjung jangka pendek bisnis, intra-perusahaan transferees, investor dan layanan profesional. Dalam konteks yang sama, kedua belah pihak juga akan membentuk skema penerimaan untuk perawat dan *careworkers*. Kedua belah pihak akan meningkatkan kerjasama terkait dan menguntungkan akan mempertimbangkan untuk memperluas cakupan "Pelatihan Industri dan Program Magang Teknis" meliputi layanan hotel terkait.

**7) *Energy and Mineral Resources* (sumber daya energi dan mineral)**

Pihak Jepang menyebutkan bahwa bidang sumber penghasilan barang tambang dan energi, adalah bidang penting untuk Jepang. Pihak Jepang juga mengajak Indonesia untuk memperbaiki lingkungan investasi, dan pentingnya sumber barang tambang dan energi serta Sumber daya manusia yang memadai dalam bidang ini. Sedangkan pihak Indonesia mengungkapkan bidang energi adalah satu bidang penting dari kebanyakan bidang kerjasama IJ-EPA, dan kedua belah pihak akan memajukan dialog kebijakan dan kerjasama

dalam bidang ini. Menjelang habisnya masa kontrak perjanjian jual-beli gas alam cair (LNG).

**8) *Intellectual Proerty Rights* (hak milik intelektual)**

Kedua belah pihak akan memastikan perlindungan yang memadai dan efektif dari kekayaan intelektual, mempromosikan efisiensi dan transparansi dalam administrasi sistem perlindungan kekayaan intelektual, dan memberikan langkah-langkah untuk penegakan hak kekayaan intelektual terhadap pelanggaran, pemalsuan dan pembajakan. IJEPA ini akan memberikan dasar bagi kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam bidang kekayaan intelektual.

**9) *Government Procurement* (pengadaan pemerintah)**

IJEPA tersebut akan menyediakan kerangka kerja untuk pertukaran informasi melalui titik kontak dan mekanisme untuk dialog dengan partisipasi dari kedua Pemerintah, sektor swasta masing-masing dan organisasi terkait lainnya. Kedua Pihak akan meningkatkan kerja sama teknis di daerah ini dengan maksud untuk meningkatkan transparansi.

**10) *Competition Policy* (kebijakan mengenai persaingan usaha)**

Kedua belah pihak akan mempromosikan kompetisi dengan mengatasi anti-kompetitif kegiatan di wilayah masing-masing dan bekerja sama dalam memperkuat kebijakan persaingan dan penerapan

hukum persaingan, sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing.

### ***11) Cooperation (kerjasama)***

Kedua pihak akan meningkatkan kerjasama bilateral untuk pembangunan di berbagai bidang, yaitu pembuatan industri, pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan dan investasi, perkembangan sumber penghasilan, kepariwisataan, informasi dan teknologi komunikasi, servis keuangan, usaha pengadaan pemerintah, lingkungan, dengan tujuan untuk memperkuat kemitraan ekonomi diantara mereka. Mereka juga mungkin akan meningkatkan bidang kerjasama lain untuk satu sama lain diakui di masa mendatang.

### **3. Menyoal Kepentingan Indonesia**

Hubungan kerjasama ekonomi dan perdagangan bebas antara Indonesia dengan Jepang (IJEPA), didasari oleh kepentingan nasional masing-masing negara yang menganggap satu sama lainnya adalah mitra strategis dalam upaya perwujudan pembangunan (kemakmuran dan kesejahteraan rakyat) nasional. Kepentingan nasional yang dimaksud sekurang-kurangnya memenuhi dua bidang, yakni bidang ekonomi dan politik.

Dipilihnya Jepang sebagai mitra EPA pertama bagi Indonesia tidak terlepas dari pengalaman hubungan saling menguntungkan yang telah berlangsung lama serta derajat komplementaritas yang tinggi antara

ekonomi kedua negara, dan bahwa Jepang merupakan mitra dagang, sumber investasi, dan sumber bantuan luar negeri terbesar bagi Indonesia. Selain itu, pemilihan Jepang sebagai mitra pertama dalam hubungan IJEPA (bilateral) dikarenakan pertimbangan Jepang sebagai mitra pembangunannya yang memiliki teknologi dan potensi investasi yang besar sehingga IJEPA diharapkan dapat mendatangkan manfaat berupa melipatgandakan investasi dan perdagangan.<sup>95</sup>

Dalam hal kebijakan politik luar negeri Indonesia dan demi pencapaian kepentingan nasional (ekonomi-politik) terhadap hubungan kerjasama ekonomi dan perdagangan bebas dengan Jepang, pemerintah Indonesia telah berusaha merumuskan misi dibidang perdagangan internasional antara lain; berupaya meningkatkan akses pasar dan menghilangkan hambatan perdagangan, mengembangkan kerjasama perdagangan internasional melalui negosiasi perdagangan dalam forum ekonomi multilateral, regional, bilateral, dan lembaga-lembaga perdagangan internasional, merumuskan dan mengembangkan standar, norma, prosedur, serta pemantauan dan evaluasi dibidang kerjasama perdagangan internasional, serta meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (aparatur) dan mengembangkan administrasi guna mendukung terwujudnya *good governance*.

---

<sup>95</sup> [lontar.ui.ac.id/file?file=digital/118813-T%2025101-Analisa%20kepentingan-Analisis](http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/118813-T%2025101-Analisa%20kepentingan-Analisis). Pdf. Terakhir diakses pada 6 April 2013 pukul 12.05 WIB.

Kepentingan nasional Indonesia dalam forum kerjasama IJEPa di bidang ekonomi antara lain: *Pertama*, perluasan akses pasar produk ekspor (barang dan jasa) di pasar Jepang. *Kedua*, mengembalikan investasi Jepang yang menurun dalam beberapa waktu terakhir dan juga sebagai kerangka bagi alih teknologi industri manufaktur Indonesia. *Ketiga*, meningkatkan daya saing di pasar global (karena standarisasi produk ekspor Jepang setara dengan pasar negara-negara maju lainnya). Adapun secara politis IJEPa memberikan Indonesia kedudukan setara dengan negara lain yang terlebih dahulu menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan Jepang. Hal ini berarti komoditi dan produk ekspor Indonesia akan mempunyai peluang sama besar dengan produk negara lain di pasar Jepang.

### **C. Keikutsertaan Indonesia Dalam Forum ACFTA**

Sebagaimana disebutkan pada awal pembahasan bab ini, agresifitas Indonesia dalam hubungan internasional, khususnya dalam forum kerjasama ekonomi dan perdagangan bebas dilakukan tidak hanya dalam kerangka bilateral, melainkan regional dan multilateral. Di mana hubungan kerjasama dalam berbagai kerangka tersebut, di dasari sedikitnya oleh dua motivasi, yakni motivasi politik dan ekonomi. Adapun secara politis Indonesia berusaha mensejajarkan diri dengan negara lain yang lebih dulu maju, dan secara ekonomis Indonesia berusaha meningkatkan kapasitas perdagangan dan daya

prinsip dasar kerjasama ACFTA, sektor-sektor dalam kerjasama ACFTA, dan menyoal kepentingan Indonesia.

### 1. Latar Belakang dan Prinsip Dasar Kerjasama ACFTA

Hubungan perdagangan China dan negara-negara di Asia Tenggara telah terjalin sejak abad ketiga sebelum Masehi, yakni dengan adanya "jalur sutra" yang menghubungkan Asia Tenggara dan garis pantai tenggara China. Perdagangan ini kemudian berlanjut sampai masa modern. Setelah *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) berdiri tahun 1967, hubungan antara China dan negara-negara Asia Tenggara berlanjut dan hubungan ini menempati posisi penting dalam hubungan negara-negara di Asia Pasifik. Hubungan China dan Asia Tenggara dalam bidang ekonomi, politik, dan strategi telah bertransformasi karena pertumbuhan ekonomi yang tak terduga, krisis finansial, dan perubahan-perubahan politik yang terjadi.

*Association of Sout East Asian Nations* (ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara) dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 dan ditandatangani oleh lima tokoh pendiri<sup>96</sup>. Brunei Darusalam masuk menjadi anggota ke-6 sejak 1 Januari 1984. Kemudian pada tahun 1997 bertambah anggota baru yaitu Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Kini ASEAN telah beranggotakan 10 negara di

---

<sup>96</sup>Lima Menteri Luar Negeri negara-negara Asia Tenggara mengadakan pertemuan di Bangkok selama 3 hari dari tanggal 5 hingga 8 Agustus 1967. Mereka itu adalah Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Thanat Khoman (Muangthai), Rajaratnam (Singapura), dan Narciso Ramos (Filipina). Pembentukan dan Administrasi ASEAN lengkap lihat, Teuku May Rudy,



kawasan Asia Tenggara. Sedangkan Timor Leste masih dalam proses pertimbangan anggota-anggota ASEAN.<sup>97</sup>

Dalam perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara, antara lain dinyatakan bahwa anggota ASEAN akan bekerja sama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Peningkatan tersebut dilakukan dengan perluasan pertanian, industri, dan perdagangan serta memperbaiki infrastruktur ekonomi yang saling menguntungkan bagi rakyat negara-negara Asia Tenggara. Berkaitan dengan itu, mereka akan melanjutkan penjajakan pada semua kesempatan bagi kerjasama yang lebih erat dan saling menguntungkan dengan negara-negara lain, organisasi-organisasi internasional dan regional di luar wilayah Asia Tenggara.<sup>98</sup>

Dalam perkembangannya negara-negara anggota ASEAN cukup aktif dalam merespon perkembangan ekonomi politik global, salah satunya dengan memberlakukan ASEAN *Free Trade Area* (AFTA atau kawasan perdagangan bebas) sebagai wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia. AFTA dibentuk pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-IV di Singapura tahun

---

<sup>97</sup>Rudy, Teuku May, *Administrasi & Organisasi Internasional*, (Bandung: PT Refika Aditama, Maret 2009),. Hlm. 96.

<sup>98</sup>Afadlal, Mariana, Annisa Farha, Inayati, Ratna Shofi, dkk, *Ekonomi Politik Kemitraan ASEAN : Sebuah Data Kerjasama (Memorandum Duta-duta Belgia Maret 2011)*, Hlm. 80

1992. Pada waktu disetujuinya AFTA tersebut, target implementasi penuhnya adalah pada 1 Januari 2008, dengan cakupannya adalah produk industri. Penerapan AFTA diharapkan akan mendorong perekonomian negara-negara anggota menjadi lebih efisien dan sehat, baik dari segi produksi maupun perdagangan. Namun pada faktanya, implementasi AFTA seringkali menimbulkan konflik kepentingan nasional tiap anggota.<sup>99</sup> Adapun perkembangan terakhir AFTA adalah kesepakatan untuk memasukan China ke dalam kawasan perdagangan ASEAN dan membentuk ASEAN-China *Free Trade Areas* (ACFTA atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China) yang berlaku sejak 1 Januari 2010.<sup>100</sup>

Sekurang-kurangnya ada dua motivasi bagi ASEAN dalam memberlakukan ACFTA. *Pertama*, krisis yang melanda ASEAN pada Februari 1997 mengharuskan ASEAN membangun kerjasama dengan negara yang ekonominya mapan (termasuk China). *Kedua*, ACFTA dijadikan sebagai batu pijakan dalam mewujudkan *ASEAN Economic Community* (AEC) pada tahun 2015 mendatang.

Sejak krisis keuangan (Februari 1997), negara-negara anggota ASEAN telah melakukan berbagai upaya agar lepas dari bayang-bayang krisis keuangan dengan cara meningkatkan integrasi ekonomi intra-regional, menyesuaikan struktur industri, menormalkan kembali perekonomian domestik, dan mempersiapkan datangnya sirkulasi pertumbuhan ekonomi

---

<sup>99</sup>Op Cit., *Perjanjian Perdagangan*,. Hlm. 142-143.

<sup>100</sup>Op Cit., *Perjanjian Perdagangan*,. Hlm. 200-210.

baru. Krisis yang melanda ASEAN pada 1997-an disebabkan oleh lemahnya kondisi perekonomian intra-regional ASEAN, yang didorong oleh ketergantungan ekonomi yang besar kepada Amerika Serikat dan Jepang, pasar modal yang terlalu terbuka, interdependensi Perekonomian intra-regional lemah, dan persamaan dalam struktur industri.<sup>101</sup>

Bagaimanapun, perekonomian ASEAN memiliki beberapa kekuarangan yang diwarisi, yang membatasi integrasi ekonomi regionalnya. Bagi ASEAN sendiri sulit untuk mengatasi kekurangan ini, dan oleh karenanya dibutuhkan pengenalan terhadap kekuatan di luar ASEAN. Beberapa kekuarangan yang ada pada ASEAN antara lain<sup>102</sup> :

1. Tingkat perkembangan rendah.
2. Pasar domestik dan intra regional yang kecil
3. Kurangnya kelengkapan ekonomi
4. Kurangnya kelompok inti bagi integrasi ekonomi regional.

Selain itu, proses perkembangan ekonomi ASEAN sendiri dimulai dari rencana terbesar ASEAN yang membangun *ASEAN Economic Community* (AEC) dimana AEC tersebut dipercaya akan membawa kerjasama ekonomi ke arah yang lebih luas, yaitu dalam satu kerangka komunitas ASEAN. *ASEAN Economic Community* adalah salah satu dari tiga (3) pilar *ASEAN integration* yang telah disetujui bersama oleh Kepala Negara dari

---

<sup>101</sup>Hafizurrahman, Skripsi, *Dampak Kerjasama Ekonomi Cina-ASEAN Terhadap Perkembangan Perdagangan ASEAN*, (Yogyakarta : UMY, 2008),. Hlm. 60-62. (Diolah)

<sup>102</sup>*Ibid.*, Hlm. 82-86.

sepuluh (10) negara anggota ASEAN dalam pertemuan di Bali tahun 2003 yang dilakukan melalui *Declaration of ASEAN Concord II* atau yang dikenal dengan *Bali Concord II*.<sup>103</sup> Konsep utama dari AEC adalah menciptakan ASEAN pada tahun 2015 sebagai pasar tunggal dan kesatuan basis produksi dimana terjadi *free flow* atas barang, jasa, faktor produksi, investasi, dan modal serta penghapusan tarif bagi antar negara ASEAN yang kemudian diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan kesejahteraan ekonomi diantara negara-negara anggotanya melalui kerjasama yang saling menguntungkan sehingga tercipta wilayah ekonomi ASEAN yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif dimana telah terjadi aliran bebas atas barang, jasa, investasi dan modal, pembangunan yang merata dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi tahun 2020.<sup>104</sup>

Hubungan formal ASEAN-China dimulai pada 1991, kedua pihak telah melakukan banyak hal untuk mengisi dan mempererat hubungan kawasan ini. Hubungan ASEAN-China menyentuh berbagai bidang, mulai dari politik, dan sosial budaya. Banyak keberhasilan telah diraih, namun demikian masih banyak pula hal yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Selain itu, hubungan China dan Asia Tenggara dapat dilihat dari dua perspektif :*Pertama*, dari sudut pandang negara tetangga di Asia Tenggra terdapat beban historis yang harus ditanggung bersama. *Kedua*, batas geografis Vietnam, Laos, Myanmar di bagian barat daya China selatan,

---

<sup>103</sup> *Op Cit., Perjanjian Perdagangan*,. Hlm. 139-140.

<sup>104</sup> *Ibid.*, Hlm. 140.

serta hubungan yang tidak pernah putus antara China dan Thailand di bidang perdagangan dan diplomasi sulit untuk diabaikan dalam waktu yang cukup lama. Sementara itu, beberapa negara kepulauan percaya bahwa untuk bertahan dari ancaman China perlu mengandalkan intervensi kekuatan besar lainnya. Oleh karena itu mereka sadar bahwa mereka perlu bersikap fleksibel dalam membina hubungan bilateral dan multilateral apabila ingin bertahan dalam lingkungan global yang berkembang cepat.<sup>105</sup>

Keputusan untuk membentuk zona perdagangan bebas antara ASEAN dan China (ACFTA) merupakan tanggapan terhadap usulan yang muncul dari mantan Perdana Menteri China, Zhu Rongji, saat dilangsungkannya KTT ASEAN keenam pada November 2000. Selanjutnya pada November 2002, ASEAN dan China menandatangani Kerangka Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara ASEAN dan China. Kerangka kerjasama ini meresmikan komitmen ASEAN dan China untuk memperkuat kerjasama ekonomi. Didalam *framework* tersebut disepakati pentahapan pembentukan perdagangan bebas untuk barang pada tahun 2004, sektor jasa tahun 2007, dan investasi tahun 2009. Sementara dari sisi kesiapan perdagangan bebas bagi ASEAN juga berlaku bertahap. Perdagangan bebas mulai berlaku tahun 2010 antara Cina dengan ASEAN-6 yaitu untuk Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Philipina, dan Brunei. Sementara tahun 2015 berlaku bagi Cina dengan ASEAN-4 yaitu Kamboja, Vietnam, Laos, dan Myanmar.

---

<sup>105</sup> *Op Cit., Ekonomi Politik*,. Hlm. 125-128.

ASEAN-China *Free Trade Agreement* (ACFTA) atau China-ASEAN *Free Trade Agreement* (CAFTA) merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peraturan dan ketentuan investasi, peningkatan akses pasar jasa, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian Cina-ASEAN dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China.<sup>106</sup>

Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) dibentuk berdasarkan dua dasar hukum internasional penting. *Pertama, Framework Agreement on Comprehensive Economy Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China* (kerangka perjanjian). Kerangka perjanjian ditandatangani pada **November 2002** di Phnom Penh, Kamboja dan ditandatangani oleh para Kepala Pemerintahan negara-negara ASEAN dengan Kepala Pemerintahan China ketika itu sedangkan protokol perubahannya ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi tanggal **6 Oktober 2003** di Bali. *Kedua*, adalah *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (perjanjian perdagangan barang) yang ditandatangani pada **9 November 2004**. Perjanjian perdagangan barang tidak ditandatangani

---

<sup>106</sup> <http://ditjenkpi.kemendag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%20FTA.pdf>, terakhir diakses pada 6 Maret 2013 pukul 21.10 WIB.

oleh Kepala Pemerintahan, melainkan oleh para Menteri-menteri negara-negara ASEAN dan China yang bertanggungjawab atas perdagangan internasional.<sup>107</sup>

Adapun kesepakatan perjanjian ini bertujuan untuk: *pertama*, memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi kedua pihak; *kedua*, meliberalisasikan perdagangan barang, jasa dan investasi; *ketiga*, mencari area baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua pihak; dan terakhir, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara anggota baru ASEAN dan menjembatani gap yang ada di kedua belah pihak. Kedua pihak juga menyepakati untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui: penghapusan tariff dan hambatan non-tariff dalam perdagangan barang; liberalisasi secara progresif perdagangan jasa; membangun regim investasi yang kompetitif dan terbuka dalam kerangka ASEAN-China FTA.

Secara khusus hubungan Indonesia (sebagai anggota ASEAN) dengan China sudah dimulai berabad-abad. Hubungan diantara kedua negara mengalami pasang surut akibat perbedaan sosial dan politik kedua negara (terutama saat paham komunisme telah melembaga sebagai Partai Komunis Indonesia atau PKI). Hubungan perdagangan Indonesia dengan China sebelumnya dijalankan melalui beberapa saluran/negara perantara seperti Singapura dan Hongkong. Setelah China membuka diri dalam

---

<sup>107</sup> *Op Cit., Perjanjian Perdagangan*, Hlm. 159-169.

perdagangan internasional kemudian berubah dan berangsur-angsur terjadi perdagangan terbuka dan langsung terlebih dengan kesepakatan kerjasama dalam forum ACFTA yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Peningkatan hubungan Indonesia-China mencapai klimaksnya denganditandatangani *Strategic Partnership Agreement* antara Indonesia-China pada tanggal 25 April 2005, saat Presiden Hu Jintao berkunjung ke Indonesia. Kemitraan Strategis ini akan difokuskan untuk memperkuat kerjasama politik dan keamanan, memperdalam kerjasama ekonomi dan pembangunan, meningkatkan kerjasama sosial budaya, dan memperluas hubungan nonpemerintah. Ada tiga bidang luas yang dicakup dalam perjanjian kemitraan strategis ini, yaitu kerjasama politik dan keamanan, kerjasama ekonomi dan pembangunan dan kerjasama sosialbudaya.<sup>108</sup>

Mulai 1 Januari 2010 Indonesia telah membuka pasar dalam negeri secara luas kepada negara-negara ASEAN dan China. Pembukaan pasar ini merupakan implementasi dari perjanjian perdagangan bebas ACFTA. Produk-produk impor dari ASEAN dan China lebih mudah masuk ke Indonesia dan lebih murah karena adanya dan penghapusan tarif pengurangan tarif, serta tarif akan menjadi nol persen dalam jangka waktu tiga (3) tahun. Sebaliknya Indonesia juga memiliki kesempatan

---

<sup>108</sup>Zainuddin Djafar, *Indonesia, ASEAN & Dinamika Asia Timur, Kajian Perspektif Asia Ekonomi-*



yang sama untuk memasuki pasar dalam negeri negara-negara ASEAN dan China.

Tahap awal perdagangan Indonesia-China dapat dibagi kedalam tiga fase, yakni dalam fase 2005, 2007, dan 2009. Dalam fase pertama ini performa Indonesia dapat dikatakan cukup sempurna dengan perolehan surplus sebesar US\$ 819. 000.000 (delapan ratus sembilan belas juta dollar). Performa yang baik ini semakin meningkat sampai dengan 2006 dengan catatan Indonesia surplus dengan mencapai US\$ 1. 700. 000. 000 (satu miliar tujuh ratus juta dollar). Dalam fase yang kedua Indonesia masih mengalami surplus sebesar US\$ 1. 100. 000. 000 (satu miliar seratus juta dollar) di tahun 2007. Angka ini tetap menunjukkan surplus bagi Indonesia walaupun Indonesia mengalami penurunan surplus sebesar 36 persen. Di tahun 2008 Indonesia justru defisit sebesar US\$ 3. 600. 000. 000 (tiga miliar enam ratus juta dollar). Dalam fase yang ketiga Indonesia masih mengalami defisit sebesar US\$ 2. 600. 000. 000 (dua miliar enam ratus juta dollar).<sup>109</sup>

## **2. Sektor-sektor Dalam Kerjasama ACFTA**

ACFTA dimulai ketika pada tahun 2001 digelar ASEAN-China Summit di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Pertemuan kelima antara ASEAN dengan China ini menyetujui usulan China untuk membentuk ACFTA dalam waktu 10 tahun. Lima bidang kunci yang

pengembangan Sumber Daya Manusia, investasi antar-negara dan pembangunan di sekitar area sungai Mekong. Pertemuan ini ditindaklanjuti dengan pertemuan antar Menteri Ekonomi dalam ASEAN-China Summit tahun 2002 di Phnom Penh, Vietnam. Dalam pertemuan ini menyepakati "*Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation*" (CEC), yang didalamnya termasuk FTA. Sejak pertemuan itulah ACFTA dideklarasikan.

Kesepakatan CEC dalam pertemuan itu mengandung tiga pilar, yaitu :**liberalisasi, fasilitasi dan kerjasama ekonomi.** Adapun prinsip-prinsip pengaturan perdagangan bebas dalam kerangka ACFTA sebenarnya tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas yang diatur dalam ketentuan WTO. Hal ini disebabkan karena ketentuan dalam ACFTA tetap mengacu pada WTO.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup>Gotar Bain, *Uruguay Round dan Sistem Perdagangan Masa Depan*, (Jakarta, Djambatan, 2001), hlm. 142, dan prinsip tersebut adalah: (1) MFN (*Most-Favoured-Nation*), yaitu perlakuan sama terhadap semua anggota mitra dagang berdasarkan kesepakatan WTO, (2) *Nation Treatment*, yaitu perlakuan yang sama diberikan baik terhadap badan usaha milik asing maupun badan usaha milik negara sendiri, (3) *Transparency*, yaitu mengharuskan negara-negara anggota membuat seluruh peraturan perundangan yang relevan terbuka untuk semua pihak, (4) *Regulation*, yaitu suatu peraturan objektif dan bisa diterima, karena peraturan domestik merupakan cara yang paling efektif untuk mengatur dan mengawasi perdagangan jasa, maka kesepakatan menetapkan agar negara-negara anggota mengatur perdagangan jasa yaitu mengharuskan negara-negara anggota membuat seluruh peraturan perundangan yang relevan terbuka untuk semua pihak, secara tidak berat sebelah, (5) *Recognition* atau pengakuan, yaitu membuat kesepakatan untuk saling mengakui klasifikasi masing-masing dalam hal prosedur izin dan sertifikat pemasok barang, (6) *International Transfer*, yaitu suatu negara harus membuat komitmen untuk membuka sektor jasa bagi *foreign competition*, (7) Komitmen Spesifik, yaitu komitmen masing-masing anggota secara individu untuk membuka pasar bagi sektor jasa spesifik, (8) *Basis For Progressive Liberalisation* atau liberalisasi progresif, yaitu meletakkan dasar bagi liberalisasi progresif di bidang jasa melalui pengembangan dari nasional *schedules* masing-masing negara. Dikutip, dari Disertasi Ariawan, *Perjanjian Perdagangan Bebas Dalam Era Liberalisasi Perdagangan : Studi Mengenai ASEAN-*

*Pilar pertama*, adalah liberalisasi. Liberalisasi yang dimaksud mencakup perdagangan bebas untuk barang (berlaku tahun 2004), jasa (2007) dan investasi (2009) dalam kawasan ACFTA.

- Persetujuan Perdagangan Barang. Dalam hal ini terdapat tiga tahap atau skema penurunan tarif yang meliputi<sup>111</sup> :

### 1) Tahap I *Early Harvest Program*(EHP)

Produk-produk dalam EHP Chapter 01 s.d 08 antara lain : Binatang hidup, ikan, *dairy products*, tumbuhan, sayuran, dan buah-buahan (SK Menkeu No 355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam kerangkaEHP ACFTA). Sedangkan, Kesepakatan Bilateral (Produk Spesifik) antara lain kopi, minyak kelapa/CPO,Coklat, Barang dari karet, dan perabotan (SK Menkeu No 356/KMK.01/2004 tanggal 21 juli 2004 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang Dalam Kerangka EHP Bilateral Indonesia-China FTA.Selain itu, penurunan tarif dimulai 1 Januari 2004 secara bertahap dan akan menjadi persen pada 1 Januari 2006.

### 2) Tahap II dan III (2006-2010)

Normal Track I tariff akan menjadi 0 persen pada tahun 2010 (dari 2000-2010 tahap terakhir dari 5 persen menjadi 0

persen, telah ditetapkan melalui SK. MEN-KEU No. 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ACFTA.). Normal Track II tarif akan menjadi 0 persen pada tahun 2012.

### 3) Tahap III *Sensitive / Highly Sensitive List*

*Sensitive Track* dibagi dalam dua klasifikasi :

#### 1) *Sensitive List (SL)* ;

- a. Tahun 2012 : 20 persen
- b. Pengurangan menjadi 0-5 persen pada tahun 2018.
- c. Produk sebesar 304 Produk (HS 6 digit) antara lain Barang Jadi Kulit :tas, dompet; Alas kaki : Sepatu sport, Casual, Kulit; Kacamata; AlatMusik; Tiup, petik, gesek; Mainan: Boneka; Alat Olah Raga; Alat Tulis;Besi dan Baja; Spare part; Alat angkut; Glokasida dan Alkaloid Nabati;Senyawa Organik; Antibiotik; Kaca; Barang-barang Plastik

#### 2) *Highly Sensitive List (HSL)*

- a. Tahun 2015 = 50%
- b. Produk HSL adalah sebesar 47 Produk (HS 6 digit), yang antara lain terdiri dari Produk Pertanian, seperti

D. ... dan ... Produk Industri

Tekstil dan produk Tekstil (ITPT); Produk Otomotif;  
Produk *Ceramic Tableware*.

- Persetujuan Perdagangan Jasa. Perjanjian persetujuan perdagangan jasa/*trade in service* ACFTA ditandatangani pada tanggal 14 Januari 2007 di Cebu, Filipina dan mulai berlaku secara efektif di negara-negara yang terkait pada tanggal 1 Juli 2007. Perjanjian ini telah diratifikasi di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden No 48 tahun 2008. Hal ini menandai langkah awal untuk meningkatkan integrasi dan kerjasama ekonomi masing-masing pihak, serta diharapkan dapat memfasilitasi perkembangan sektor jasa dan menjadi fondasi yang kuat bagi pelaksanaan ACFTA pada tahun 2010. Selain itu, dengan adanya persetujuan ini para penyedia jasa di kedua wilayah akan mendapatkan manfaat perluasan akses pasar jasa sekaligus *national treatment* untuk sektor dan subsektor yang dikomitmenkan oleh masing-masing Pihak ACFTA.
- Persetujuan Investasi. Melalui Persetujuan Investasi tersebut, pemerintah Negara-negara Anggota ASEAN dan China secara kolektif sepakat untuk mendorong peningkatan fasilitasi, transparansi dan rezim investasi yang kompetitif dengan menciptakan kondisi investasi yang positif, disertai berbagai upaya untuk mendorong promosi arus investasi dan kerjasama bidang investasi. Disamping itu kedua pihak juga secara

bersama-sama akan memperbaiki aturan investasi menjadi lebih transparan dan kondusif demi peningkatan arus investasi. Selain itu hal terpenting lainnya adalah ASEAN dan China sepakat untuk saling memberikan perlindungan investasi. Kegiatan sosialisasi ini akan memaparkan kebijakan, peraturan, ketentuan, dan prosedur investasi. Satu hal lagi yang sangat penting, kedua pihak sepakat mendirikan *one stop centre* untuk memberikan jasa konsultasi bagi sektor bisnis termasuk fasilitasi pengajuan perijinan. Apabila terjadi sengketa yang muncul antar investor dan salah satu pihak, persetujuan ini memberikan mekanisme penyelesaian yang spesifik disamping adanya kesepakatan semua pihak untuk terus berupaya menjamin perlakuan yang sama atau non-diskriminatif.

*Pilar kedua, Fasilitasi yang dimaksud mencakup berbagai isu seperti penghapusan hambatan non-tarif, pengakuan standar di masing-masing pihak dan penilaian prosedur bagi sektor jasa.*

*Pilar ketiga, Kerjasama Ekonomi. Didalam Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China, kedua pihak sepakat akan melakukankerjasama yang lebih intensif di beberapa bidang seperti : Pertanian; Teknologi Informasi; Pengembangan SDM; Investasi; Pengembangan Sungai Mekong; Perbankan; Keuangan; Transportasi; Industri; Telekomunikasi;*

sebagainya. Pemerintah China telah mengalokasikan dana sebesar USD 10 miliar dibawah *ChinaASEAN Investment Cooperation Fund* untuk membiayai proyek-proyek kerjasamainvestasi utama seperti infrastruktur, energi dan sumberdaya, teknologi komunikasi dan informasi dan bidang-bidang lainnya sekaligus menyediakan fasilitas kredit sebesar USD 15 juta untuk mendukung proses integrasi ASEAN dan kerjasama ekonomidibawah ACFTA untuk lima tahun kedepan.

### **3. Menyoal Kepentingan Indonesia**

Setidaknya terdapat tiga peluang positif yang dikemukakan pemerintah pada saat kesepakatan ACFTA pertama kali ditandatangani, *Pertama*, penurunan dan penghapusan tarif serta hambatan non tarif di China membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan volume dan nilai perdagangan ke negara yang penduduknya terbesar dan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. *Kedua*, penciptaan rezim investasi yang kompetitif dan terbuka membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi dari China. *Ketiga*, peningkatan kerjasama ekonomi dalam lingkup yang lebih luas membantu Indonesia melakukan peningkatan *capacity building*, *transfer technology*, dan *managerial capability*. Dan secara politis kepentingan nasional Indonesia adalah menjaga stabilitas keamanan nasional dan ASEAN melalui kerjasama alih teknologi (dalam kendali C-705 secara bertahap)

#### **D. Kedigjayaan Negara Maju Dalam Menekan Negara Berkembang Melalui Perjanjian Perdagangan Bebas**

Pada awalnya esensi globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas yang bebas dari hambatan-hambatan penyebab distorsi memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa-bangsa. Namun penyalahgunaan potensi tersebut oleh negara-negara maju berakibat semakin terpuruknya negara-negara berkembang, yang berakibat meningkatnya rasa ketidakadilan terhadap mereka.<sup>112</sup>

Beberapa peneliti menyatakan bahwa walaupun perjanjian bilateral mungkin menggoda bagi suatu negara berkembang untuk mendapatkan keuntungan spesifik dari mitra negara majunya, misalnya akses pasar yang lebih baik untuk sebagian produknya, ada beberapa potensi bahaya dan kerugian.<sup>113</sup> Dalam bidang akses pasar atas barang, penghapusan atau pengurangan tarif secara tajam bagi hampir semua kategori barang akan menghilangkan alat yang penting dan kuat (yaitu tarif) yang dipunyai negara berkembang sebagai bagian penting dari kebijakan industri dan pertanian. Kesepakatan untuk menggunakan pendekatan "*negative list*" (daftar negatif) memberikan tekanan lebih besar pada negara berkembang untuk meliberalisasikan (membuka) pasar dan menciutkan ruang kebijakan untuk memilih sektor mana yang akan diliberalisasi dan kapan.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup>*Ibid.*, Hlm. 80-81.



Pada gilirannya kesepakatan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* dan *ASEAN-China Free Trade Agreement* telah melemahkan peran Indonesia sebagai negara berdaulat, karena baik EPA ataupun FTA menawarkan peluang yang semu dan menghadirkan ancaman yang pasti. Berikut akan dibahas mengenai hubungan FTA dengan GATT/WTO dalam perdagangan global, kepentingan Jepang dalam kesepakatan EPA dengan Indonesia, dan kepentingan China dalam forum ACFTA.

### **1. Hubungan Antara FTA dengan GATT/WTO dalam Perdagangan Global**

Pengaturan ekonomi global dilakukan melalui tiga regim ekonomi, yaitu :*Bretton Woods, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* dan *World Trade Organization (WTO)*. Ketiga rejim tersebut telah mendorong pemberlakuan *Free Trade Agreement (FTA)* oleh berbagai negara baik dalam forum bilateral, regional, maupun multilateral yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian masing-masing negara terlebih untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pada dasarnya secara normatif FTA dalam berbagai forum, dan oleh semua negara anggota WTO tanpa terkecuali, pelaksanaan kerjasama FTA berkiblat pada sistem/aturan GAAT/WTO sebagai penggerak sekaligus pemantau perdagangan dunia. Sebagaimana tersebut, dalam komponen-komponen GATT yang salah satu poinnya adalah, GATT sebagai perjanjian internasional.*Genaral Agreement on Tariff and Trade* sebagai

Prinsip ini disebut juga sebagai azas Non-Diskriminasi, sebagaimana diatur di dalam artikel 1 GATT 1994 yang mensyaratkan semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani dalam rangka GATT-WTO harus diperlakukan sama kepada semua negara anggota WTO. Sebagai contoh adalah terkait penerapan tarif bea masuk dari suatu negara harus sama penerapannya kepada negara lain.

#### 2) *Tariff Binding*

Setiap negara wajib memiliki daftar/buku tarif bea masuk yang mengikat dan transparan, sehingga setiap pihak yang berkepentingan dapat memprediksikepentingannya.

#### 3) *National Treatment*

Maksud dari prinsip ini adalah sebagaimana diatur di dalam artikel III GATT 1994 yang menghendaki agar setiap negara mengatur produk impor dengan produk dalam negerinya secara seimbang tanpa ada diskriminasi dengan alasan untuk melindungi industri dalam negeri.

#### 4) *Tariff Protection*

Prinsip *tariff protection* mensyaratkan agar segala kepentingan untuk perlindungan industri dalam negeri menggunakan tarif, sehingga lebih transparan dan *predictable*.

#### 5) *Special and Differential Treatment*

Untuk meningkatkan partisipasi negara-negara berkembang dalam perundingan perdagangan internasional, prinsip ini diakomodasi dan

disepakati menjadi salah satu bagian dari GATT-WTO. Implementasi dari prinsip ini adalah adanya kemudahan-kemudahan tertentu bagi negaranegara berkembang.

Maraknya pembentukan FTA diantaranya disebabkan oleh kurang berhasilnya Pertemuan Tingkat Menteri WTO di Seattle tahun 1999 dan buntutnya perkembangan perundingan WTO samapai saat ini, terutama oleh mandeknya proses kesepakatan dalam pengaturan produk pertanian. Sejumlah negara berusaha untuk melakukan *Free Trade Agreement* karena khawatir akan dampak hilangnya pasar yang sebelumnya mereka kuasai, yang kemudian beralih diantara mitra yang melakukan FTA (*trade diversion*). Misalnya apabila terbentuk FTA antara Jepang dengan Thailand, maka pangsa pasar Indonesia yang sebelumnya dinikmati di pasar Jepang, akan terdorong beralih dan dinikmati oleh Thailand. Hal ini terjadi karena dengan FTA, arus barang dagangan dua arah akan bebas hambatan dan bebas tarif dibandingkan tanpa FTA yang mungkin terkena tarif lebih tinggi.

## **2. Kepentingan Jepang Dalam Kerjasama IJEPA**

Pada bulan November 2002, Jepang secara khusus membentuk divisi EPA di dalam Biro Hubungan Ekonomi, yang bertugas merencanakan dan membuat strategi komprehensif untuk EPA, memastikan respon yang disatukan dan dikordinasikan dan menjadi bagian dari delegasi diplomasi Jepang untuk negosiasi EPA. Kebijakan dasar EPA dikeluarkan pada

promosi kemitraan ekonomi pada tanggal 21 Desember 2004. Dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa kebijakan ini dikeluarkan untuk menghadapi latar belakang pertumbuhan globalisasi ekonomi. Dalam kebijakan tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi Jepang. Secara simultan, EPA diproyeksikan untuk mempromosikan reformasi struktural di Jepang dengan negara mitranya. Selain itu, EPA juga dapat berkontribusi pada penciptaan lingkungan internasional yang dapat memberi keuntungan pada Jepang, baik dari strategis politik maupun diplomatik.

Selain itu, Secara ringkas, EPA merupakan strategi dan kebijakan perdagangan luar negeri Jepang untuk mendorong daya saing ekonomi. Tujuan utama Jepang melakukan EPA dengan banyak negara adalah untuk menjamin pasokan energi dalam jangka panjang. Bagi Jepang keterjaminan pasokan energi dan bahan baku akan menjadi kunci untuk mengembangkan dan menjaga daya saing industrinya.<sup>117</sup>

Adapun dalam mengidentifikasi negara dan kawasan dalam bernegosiasi, pemerintah Jepang mempertimbangkan segala faktor termasuk kondisi ekonomi dan perspektif diplomasi dari negara-negara yang akan mejadi mitra dalam EPA Jepang. Berikut beberapa faktor yang mengidentifikasi negara atau kawasan yang potensial untuk menjadi mitra EPA Jepang yang ditentukan bersasarkan :

---

<sup>117</sup> Khor. Martin. *Memperdagangkan Kedaulatan : Free Trade Agreement dan Nasib Bangsa*, terj :

- a) Penciptaan lingkungan internasional yang menguntungkan bagi Jepang.
- b) Pencapaian terhadap kepentingan ekonomi Jepang secara keseluruhan.
- c) Situasi dari negara mitra dan kemungkinan merealisasikan EPA.

Model kerjasama EPA sangat menguntungkan bagi Jepang karena memungkinkan Jepang untuk dapat mempertahankan langkah proteksi untuk sektor ekonomi tertentu, sementara secara simultan menegosiasikan langkah-langkah liberalisasi tertentu yang memungkinkannya untuk menargetkannya dalam sektor spesifik dalam kompetisi yang lebih besar dan reformasi struktural. Melalui EPA, Jepang dapat lebih mengontrol arah dan jalan menuju liberalisasi ekonomi domestiknya daripada melalui kerangka multilateral yang mewajibkan timbal balik (*prinsip reciprocity*) yang lebih besar.

Selain itu, EPA juga memberikan keuntungan dalam hal kontrol terhadap strategi pembangunan dan tatanan produksi. Negosiasi EPA selalu melibatkan langkah-langkah kerjasama yang lebih luas dari sekedar EPA. Dalam kerangka itu pakar kerjasama selalu ditopang oleh paket ODA untuk memilih sektor industri dan proyek integrasi. Hal ini mengindikasikan bahwa kepentingan Jepang bukan hanya liberalisasi

### 3. Kepentingan China dalam Kerjasama ACFTA

Masuknya China ke WTO telah mendorong peningkatan perdagangan asing China ke babak yang baru dan mendorong kerjasama perdagangan antara China dan dunia. Keanggotaan WTO merepresentasikan perubahan mendasar pada kebijakan ekonomi China. China telah mengubah orientasi kebijakan luar negerinya dengan mengefektifkan kerjasama dengan negara-negara dan kawasan berkembang dan salah satunya adalah dengan ASEAN melalui forum kerjasama ACFTA. Salah satu bukti dari keinginan China untuk mengubah sistem ekonominya terutama setelah menjadi anggota WTO, adalah dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan ekonomi dan perdagangan yang menunjukkan komitmen China terhadap liberalisasi perdagangan.

Tujuan kebijakan-kebijakan perdagangan China secara umum mencerminkan reformasi ekonomi China yang didukung oleh keanggotaan China di WTO. Tujuan *pertama*, untuk mempercepat pembukaan ekonomi China ke dunia. *Kedua*, untuk mempelajari teknologi asing dari negara lain. *Ketiga*, membangun perdagangan asing. *Keempat*, mempromosikan pembangunan ekonomi yang aman. *Kelima*, untuk mengeratkan sistem perdagangan multilateral. *Keenam*, kebijakan perdagangan China ditujukan untuk intensifikasi perjanjian perdagangan bebas secara bilateral maupun multilateral dengan mitra dagangnya.

ACFTA adalah salah satu strategi ekonomi China guna membawa dirinya sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Kerjasama

perdagangan bebas ini sekurang-kurangnya didorong oleh dua motif/kepentingan, yakni ekonomi dan politik China. *Pertama*, kepentingan ekonomi China dalam ACFTA, adalah meningkatkan perekonomian negaranya dan daya saing di pasar global melalui modal asing yang masuk. ACFTA memberikan keuntungan tersendiri bagi China dalam hal memenuhi kepentingan ekonominya, seperti :China akan mendapatkan sumber pangan dari ekspor ASEAN untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya.*Kedua*, kepentingan politik China dalam ACFTA, adalah meningkatkan pengaruhnya di Asia Timur dan menjadi penyeimbang kekuatan dunia (Pasifik-Atlantik), mengingat kerja sama perdagangan bebas ini sebagai respon terhadap regionalisme dunia yang semakin kompetitif, dan keinginan China untuk menciptakan lingkungan yang damai dan stabil dalam setiap kebijakan ekonominya pada skope bilateral, regional maupun multilateral. Adapun keuntungan lain dari pemberlakuan ACFTA adalah : Asia Tenggara dijadikan sebagai salah satu sumber alternatif bagi kebutuhan energi China (*oil-nation diplomacy*), dan pengalihan perdagangan dari perdagangan intra negara anggota ASEAN dan dari negara di luar kawasan kepada China dengan dihapuskan atau

14. ... ..